

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang merupakan suatu negara yang memiliki hubungan kuat dengan negara-negara Asia Tenggara, Hubungan Jepang dengan negara-negara di Asia Tenggara secara kuat di pengaruhi oleh peristiwa-peristiwa historis atau sejarah kolonialisme, Jepang pernah melakukan penjajahan terhadap negara Malaysia pasca perang dunia kedua, serta negara-negara Asia Tenggara lainnya, terkecuali Thailand dimana tidak pernah terjajah oleh Jepang. Hingga saat ini sejarah kolonialisme tersebut tidak pernah terlupakan.

Dewasa ini, Hubungan Jepang dengan negara Asia Tenggara khususnya negara-negara di regional ASEAN semakin erat, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya hubungan kerjasama yang semakin berkembang dengan baik dan saling membutuhkan di berbagai bidang. Salah satunya adalah dibidang ekonomi, di mana negara-negara ASEAN merupakan mitra dagang terpenting kedua bagi Jepang setelah China dan tujuan investasi ke dua dengan menjadi basis dari 6800 perusahaan Jepang dan sekitar 120.000 ekspatriat (orang yang tinggal sementara atau menetap di luar negeri) Jepang yang menetap di dalamnya, ASEAN menjadi pilihan utama liberalisasi perdagangan dan investasi bagi Jepang pada masa mendatang.¹

Disamping adanya hubungan kerjasama dibidang tersebut, Jepang juga melakukan upaya peningkatan kunjungan wisatawan dari Asia Tenggara bahkan

¹ Hubungan Strategis ASEAN-Jepang di Masa Depan, (diakses pada tanggal 04 april 2014) dari <http://economy.okezone.com/>

dunia untuk berkunjung ke Jepang. Namun setiap wisatawan yang ingin berkunjung ke Jepang harus memiliki Passpor dan Visa, tergantung pada kebijakan regulasi di setiap negara yang diberikan. Ada yang harus mengurus Visa dan ada pula yang tanpa harus mengurus Visa. Passpor dan Visa merupakan dua komponen yang wajib dimiliki oleh wisatawan manca negara yang ingin pergi keluar negeri. Karena Passpor dan Visa sebagai alat identitas serta surat izin rekomendasi dari suatu negara yang ingin mengunjungi negara yang ingin dituju.

Setiap kebijakan Visa yang dikeluarkan oleh suatu negara memiliki aturan atau batas waktu yang telah ditentukan, karena merupakan suatu keputusan negara untuk dipatuhi atau ditaati oleh para wisatawan yang ingin berkunjung ke suatu negara, seperti contohnya adalah Jepang, Jepang ini merupakan negara yang memiliki aturan ketat terhadap para datangnya kunjungan wisatawan dari manca negara yang ingin berkunjung ke Jepang, dengan demikian bahwa terlihat dari adanya kasus masalah-masalah yang didapatkan oleh pihak keimigrasian Jepang.

Isu keamanan negara Jepang menjadi sebuah masalah yang banyak menyita perhatian internasional, terutama bagi datangnya wisatawan yang berkunjung ke Jepang. Pola hubungan antar Jepang dengan negara-negara ASEAN mengarah kepada kepentingan ekonomi dan keamanan, sehingga menimbulkan terwujudnya stabilitas keamanan di kawasan. Jika kondisi keadaan kurang aman di Jepang, maka akan berdampak negatif terhadap stabilitas keamanan yaitu seperti terjadinya persoalan sosial, pelanggaran hukum, penyelundupan barang-barang terlarang, penyelundupan manusia (*Human*

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam kasus permasalahan yang ada, petugas keimigrasian Jepang melakukan upaya peningkatan keamanan serta kenyamanan terhadap para wisatawan yang berkunjung ke Jepang. Pihak keimigrasian terus meningkatkan keamanan dan menjalankan segala aturan-aturan yang ada dari setiap wisatawan yang berkunjung ke Jepang dengan mengecek kembali orisinalitas data identitas di passpor terhadap para pengunjung setiba di Jepang, karena sangat penting untuk menjaga adanya hal-hal yang tidak diinginkan oleh Jepang.

Merupakan hal yang sangat penting bahwa aturan mengenai keimigrasian Jepang terhadap wisatawan dan perlu untuk diketahui oleh wisatawan sebelum mengunjungi Jepang, karena pihak perwakilan Jepang (*Embassy*) yang ada di setiap negara memiliki kebijakan regulasi tersendiri, kebijakan regulasi Visa, dan mengaplikasikan Visa dengan sejumlah biaya administrasi ke Kedutaan Besar Jepang, tergantung pada durasi waktu dan tipe Visa yang akan digunakan. Karena setiap tipe Visa yang akan digunakan, memiliki perbedaan biaya administrasi pengaplikasian Visa, seperti tipe *Visa Single Entry*, atau *Multiple Entry* dan Jepang memberlakukan bebas Visa (*Visa Exemption*) terhadap negara yang telah diputuskan seperti negara Malaysia dan Thailand, berdasarkan data dari kementerian luar negeri Jepang (*Ministry of Foreign Affairs*) yang menyebutkan bahwa Malaysia dan Thailand diberikan bebas Visa selama periode waktu yang singkat. Malaysia diberikan bebas Visa selama 90 hari dan sedangkan Thailand

diberikan selama 15 hari.² Ada yang memberlakukan Visa kedatangan (*Visa On Arrival*) jadi pengaplikasian Visa hanya di dapatkan pada saat tiba di Jepang. Dan ada pula yang di permudahkan dalam pengaplikasian Visa yang berdasarkan durasi waktu selama 15 atau 30 hari.

Pada bulan juli 2013 Pemerintah Jepang memberlakukan bebas Visa kepada Malaysia dan Thailand, Jepang telah menganggap negara-negara di ASEAN sebagai mitra dagang terpenting bagi Jepang, Namun kebijakan bebas tersebut tidak di berikan kepada negara-negara ASEAN yang lainnya, melihat bahwa peluang wisatawan dari ASEAN yang berkunjung ke Jepang cukup meningkat. Berdasarkan data statistik dari Japan National Tourism Organization (JNTO) yang menyebutkan bahwa kunjungan Wisatawan yang berasal dari negara-negara di ASEAN mengalami kenaikan. Seperti Indonesia, Indonesia mengalami kenaikan sekitar 50%, Thailand mengalami kenaikan sekitar 59%, Vietnam 52%, dan seperti Malaysia, Singapura, Filipina juga mengalami peningkatan kunjungan yang cukup signifikan.³

Berdasarkan data kunjungan wisatawan yang berasal dari ASEAN tersebut terlihat bahwa data statistik kunjungan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Indonesia yang cukup mengalami kenaikan 50% dan negara ASEAN lainnya juga mengalami kenaikan, tapi pemerintah Jepang tidak memberikan bebas Visa terhadap negara-negara yang mengalami kenaikan tersebut, Pemerintah Jepang sendiri mengejar target kunjungan pelancong dunia ke Jepang

² Exemption of Visa (*Short-Term Stay*), (diakses pada tanggal 05 april 2014 pukul 12:00) dari http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/novisa.html

³ Highlighting Japan, (diakses pada tanggal 05 April 2014 pukul 12:30) dari <https://www.gov->

pada tahun 2030 dapat tercapai 30 juta kunjungan per tahun.⁴ Menurut Japan National Tourism Organization, sebanyak 8,37 juta wisatawan internasional datang pada tahun 2012. Sebanyak 9,3 persen atau sekitar 780.000 wisatawan pada tahun 2012 tersebut berasal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Jepang menetapkan target kunjungan dari pelancong asal Asia Tenggara sebanyak 2 juta wisatawan pada tahun 2016.⁵ Namun hal ini, pemerintah Jepang masih belum memutuskan untuk bebas Visa kepada kunjungan Wisatawan dari negara-negara ASEAN lainnya, yang kemudian kebijakan bebas Visa ini dinilai cenderung selektif terhadap negara-negara di ASEAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka yang menjadi pertanyaan dari penelitian skripsi ini adalah:

Mengapa Jepang memberlakukan bebas Visa kepada Malaysia dan Thailand?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penelitian ini di tunjukkan untuk mengetahui kebijakan politik luar negeri Jepang di kawasan regional ASEAN.

⁴ Diakses dari Kementrian Luar Negeri Jepang (*Ministry Of Foreign Affairs*) <http://www.mofa.go.jp> pada tanggal 06 April 2014

⁵ Bebas Visa Jepang untuk Thailand dan Malaysia, Bukan Indonesia, (diakses pada tanggal 05 April 2014 pukul 12:50) dari http://www.kompas.com/read/2013/06/27/1527262/Bebas_Visa_Jepang_untuk_Thailand_dan_Malaysia

- Penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisa kebijakan' Jepang dalam memberlakukan bebas Visa kepada negara Malaysia dan Thailand.
- Penelitian ini di tunjukkan sebagai sarana informasi kepada pembaca, dan pihak pihak yang membutuhkan wawasan tentang Jepang dalam upaya pengambilan keputusan politik luar negerinya serta meningkatkan hubungan kerjasamanya dengan negara-negara anggota ASEAN.
- Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat akhir dalam menyelesaikan studi kesarjanaan strata-1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Kerangka Teoritik

Untuk mendukung argument dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Konsep Kepentingan Nasional dan Teori Sistem Politik.

1. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional (*National Interest*) merupakan suatu konsep dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dalam suatu negara untuk memperoleh atau mencapai kepentingan nasionalnya. Konsep kepentingan nasional menurut Jack Plano dan Roy Olton dalam konsep kepentingan nasional suatu negara.

Berikut Jack Plano dan Roy Olton dalam konsep kepentingan nasionalnya yang mengatakan bahwa :

Kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor poling menentukan yang memandu para pembuat keputusan (Decision Making) dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang

*sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara, unsur itu mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi*⁶.

Dalam konsep ini menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan suatu faktor penting dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dalam keputusan politik luar negeri. Dalam hal ini kepentingan nasional suatu negara dalam mengambil keputusan politik luar negeri akan memiliki unsur untuk menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya (*National Interest*).

Ekonomi merupakan unsur vital dalam kepentingan nasional. Dalam hal ini tidak dapat di pungkiri bahwa pesatnya perkembangan perindustrian wisata di Jepang membawa pengaruh terhadap *economic wellbeing* dimana dapat membantu meningkatkan perekonomian Jepang secara keseluruhan. Pada dasarnya kepentingan nasional suatu bangsa dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap negara di dunia mempunyai tujuan masing-masing untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi negaranya. Tujuan tersebut antara lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, baik secara keseluruhan yang dapat dicapai melalui jangka pendek maupun jangka panjang.

Kepentingan nasional Jepang dalam bidang sektor pariwisata merupakan upaya pemerintah Jepang untuk mendorong pemerataan kesempatan dan peluang berusaha dan kerja bagi masyarakat Jepang, Mendorong pemerataan

pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang di hasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan manca negara khususnya dari negara-negara di Asia Tenggara. Pariwisata Jepang yang memiliki keunikan, menarik dan beragam budaya, ciri khas kuliner dan sebagainya, merupakan suatu kebanggaan atau ciri khas tersendiri bagi masyarakat Jepang dalam meningkatkan suatu citra diri bangsa Jepang yang dikenal sebagai negara yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan atau pelancong.

Dalam kepentingan nasional, Jepang ingin meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui dengan kunjungan wisatawan di seluruh dunia untuk berkunjung ke Jepang. Karena akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian domestik Jepang, hal ini kepada para pebisnis, masyarakat serta keseluruhan. Pemerintah Jepang terus berupaya meningkatkan wisatawan dari manca negara untuk berkunjung ke Jepang.

2. Teori Sistem Politik

Setiap negara yang berdaulat memiliki keputusan politik luar negeri, dan memiliki model atau skema sistem politik dalam merumuskan keputusan atau kebijakan untuk mengambil langkah keputusan politik luar negerinya, dalam hal ini model/skema sistem politik menurut Menurut David Easton dalam sistem politik sangat berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Dalam teori sistem politik memiliki perbatasan dalam pengertian yang sama dengan yang dimiliki oleh suatu sistem fisik. Sistem politik adalah semua tindakan yang lebih kurang langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat. Dan

sistem politik memiliki konsekuensi konsekuensi yang penting bagi masyarakat yaitu keputusan-keputusan otoritatif. Konsekuensi inilah yang disebut output.⁷

Menurut David Easton sistem politik merupakan alokasi daripada nilai-nilai, dalam pengalokasian daripada nilai-nilai tersebut bersifat memaksa dan mengikat masyarakat secara keseluruhan. Kemudian David Easton Menyatakan bahwa sistem politik dapat di perkenalkan sebagai seperangkat yang di abstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial melalui nilai nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.⁸

David Easton juga mengemukakan mengenai black box model, black box model merupakan suatu sistem politik yang dimana rakyat hanya menyimbolkan seorang pemimpin/presiden atau perdana menteri sebagai pembuat suatu kebijakan/keputusan tanpa memperkirakan bahwa kebijakan/keputusan yang ditetapkan tersebut boleh jadi merupakan ide dari orang lain (bisa menteri atau pejabat lainnya). Oleh sebab itu, menurut David Easton, sistem politik suatu negara hanya dapat dilihat dari segi input dan outputnya saja.

Dalam perspektif kerangka kerja sistem politik. Black box adalah istilah yang umumnya ditimpakan kepada kerangka kerja sistem politik. Easton memperlakukan sistem politik sebagai Black Box (kotak gelap) di mana segala proses yang terjadi di dalamnya tidak ia jelaskan sepenuhnya. Dalam kerangka kerja sistem politik, Black Box (kotak hitam) adalah fokus tempat terjadinya pemrosesan dan penerjemahan input (tuntutan dan dukungan) menjadi output (*policy*), di mana pemrosesan dan penerjemahan yang terjadi tidak dijelaskan

⁷Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews, 2008, *Perbandingan Sistem Politik* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal 6

⁸David Easton, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, 1984, Bina Aksara, hal 86.

secara rinci. Oleh Sebab itu, perlu diadakan studi analisis kebijakan yang ditujukan guna menyingkap apa yang terjadi dalam sistem politik atau black box tersebut.

Untuk menjamin tetap bekerjanya suatu sistem diperlukan input -input secara ajeg. Tanpa input sistem itu tidak akan dapat berfungsi, tanpa output tidak dapat mengidentifikasikan pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem itu. Dalam hubungan ini yang perlu diteliti lebih lanjut adalah bagaimana mengidentifikasikan input-input dan kekuatan-kekuatan yang membentuk dan merubah input-input tersebut, menelusuri proses-proses yang mentransformasikan input-input tersebut menjadi output-output, menggambarkan kondisi-kondisi umum yang dapat memelihara proses-proses itu, dan menarik hubungan antara output-output dengan input-input berikutnya dalam sistem tersebut.⁹

Masukan kebutuhan saja tidaklah cukup untuk membuat sistem politik berjalan. Masukan (input) hanyalah bahan baku untuk membuat produk jadi. Untuk tetap menjaga keberlangsungan fungsinya, sistem itu juga memerlukan energi dalam membentuk tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang memajukan dan merintangikan sistem politik, tuntutan-tuntutan yang timbul didalamnya dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya. Input (masukan) ini yang disebut dengan dukungan. Tanpa dukungan, tuntutan tidak akan bisa dipenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak akan terselesaikan.

Hubungan antara sistem politik dengan lingkungan sangat erat. sistem politik di pengaruhi oleh segala macam hal yang terjadi di

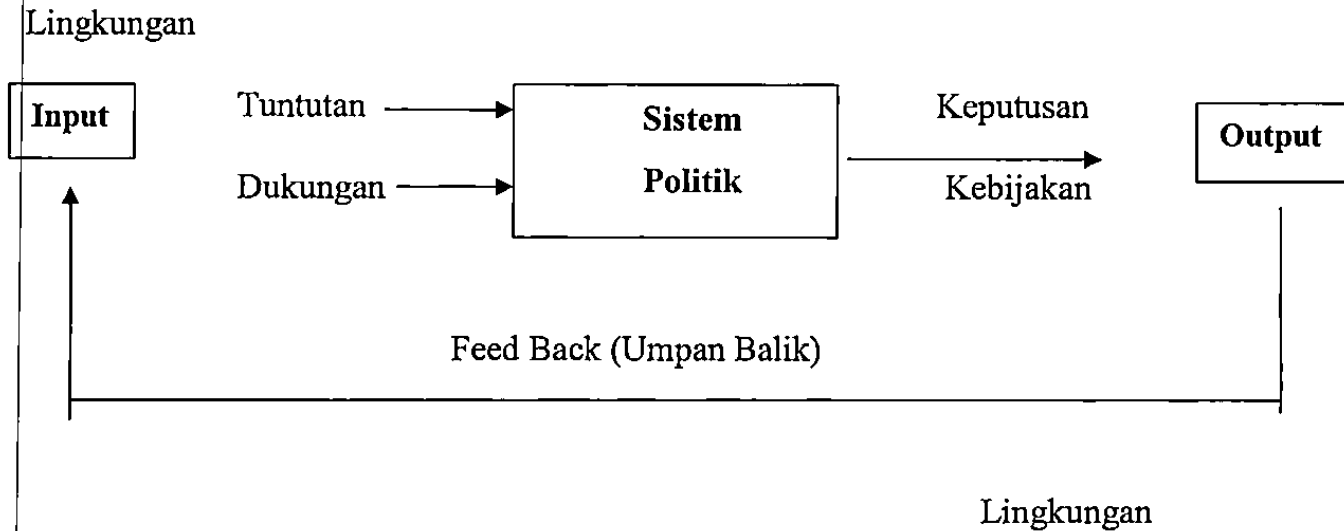
⁹Mohtar Masoed, *Opcit*, hal 7

sekelilingnya. Berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungan mengalir masuk kedalam sistem politik pengaruh lingkungan, baik dari intersosial maupun yang ekstrasosial mengalir masuk kedalam sistem politik sebagai input yang berupa tuntutan-tuntutan (*Demands*) maupun sebagai dukungan (*Support*). Hasil dari sistem politik disebut output yang mengalir ke masyarakat atau mungkin kembali lagi masuk mempengaruhi sistem politik sebagai input.

Sistem menghasilkan suatu jenis output yang berbeda dengan input yang diperolehnya dari lingkungan. Dalam buku Mohtar Mas'ood dijelaskan ada dua jenis pokok input-input suatu sistem politik yaitu tuntutan dan dukungan. Input-input inilah yang akan memberikan informasi yang akan diproses oleh sistem tersebut dan juga energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sistem tersebut.¹⁰

Untuk mendukung pertanyaan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan teori yang di gunakan David Easton dalam Teori Sistem Politik. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan pengaplikasian model sistem politik menurut David Easton, adalah Kebijakan Lenang dalam memberikan beb...

(Gambar 1.1 : Teori Sistem Politik)



(Sumber: Mohtar Mas' oed dan Colin Mac Andrews, 2008, *Perbandingan Sistem Politik* Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press.)

Berdasarkan gambar tersebut diatas, dalam sistem politik atau yang disebut (Black Box) yang berjalan secara khas tuntutan-tuntutan biasa timbul dengan tujuan merubah hubungan-hubungan politisi diantara anggota anggota itu sendiri, sebagai akibat dari ketidakpuasan atas hubungan-hubungan itu. Misalnya dalam suatu sistem politik berdasar perwakilan, dimana perwakilan setara merupakan norma politik yang penting, mungkin timbul tuntutan-tuntutan menyeimbangkan perwakilan diantara distrik distrik pemilihan kota dan desa. Juga tuntutan-tuntutan untuk merubah proses pengangkatan pemimpin pemimpin politik formal, perubahan cara amandemen konstitusi, dan tuntutan yang merupakan perwujudan inspirasi didalam sistem politik.

Kebutuhan mempengaruhi perilaku suatu sistem dengan berbagai cara.

Kebutuhan merupakan kebutuhan merupakan suatu bagian materi signifikan yang

melatari sistem tersebut beropérasi. Kebutuhan juga merupakan salah satu sumber perubahan dalam sistem politik.

Untuk bekerjanya suatu sistem diperlukan input – output. Tanpa input, suatu sistem tidak akan dapat berjalan atau berfungsi. Input memiliki pengaruh terhadap output. Dan input ini merupakan masukan dari masyarakat, pebisnis ataupun dari pemerintah ke dalam sistem politik. Sistem politik merupakan satu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, Komponen, atau bagian yang berada dalam keterkaitan yang saling kait mengait dan fungsional. sistem politik Jepang yaitu Diet. Diet adalah pusat kegiatan politik Jepang, dan merupakan salah satu proses dari berjalannya sistem pemerintahan Jepang.

Input yang masuk dari masyarakat kedalam sistem politik dapat berupa *tuntutan* dan *dukungan*. *Tuntutan* secara sederhana dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas sejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. *Dukungan* secara sederhana adalah upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. *Output* adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi dua yaitu *keputusan* dan *tindakan* yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. *Keputusan* adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu, *tindakan* adalah implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat.

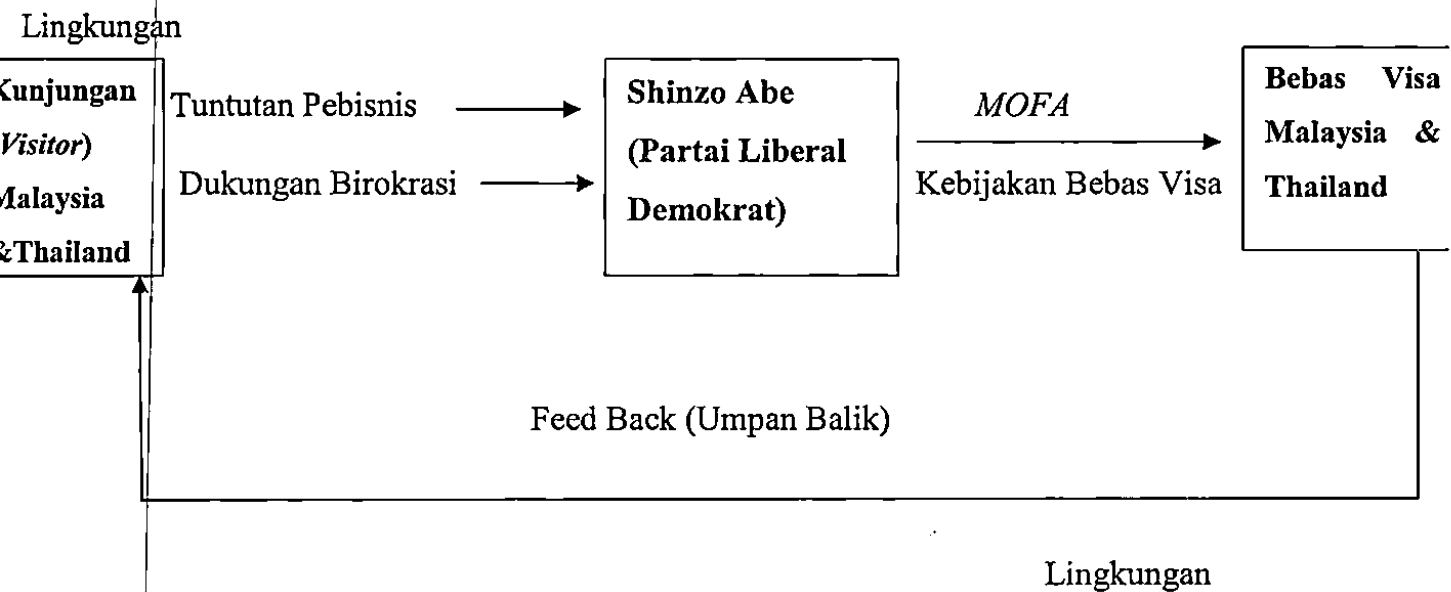
Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik dapat berupa *tuntutan* dimana para pelancong atau wisatawan yang datang ke Jepang selama ini mengalami peningkatan, hal ini akan mempengaruhi perekonomian negara dan

kesejahteraan masyarakat Jepang. Meningkatnya para wisatawan yang berkunjung ke Jepang dalam hal ini berasal dari Negara-negara di Asia Tenggara. Yang sehingga pemerintah Jepang yaitu pemimpin perdana menteri Shinzo Abe mengambil langkah atau tindakan untuk memberikan kemudahan dalam memasuki Jepang bahkan memberikan bebas Visa terhadap beberapa negara di Asia Tenggara, pemberian bebas Visa tersebut di berikan kepada negara Malaysia dan Thailand. Dan telah didukung oleh pihak pejabat yang lain seperti contoh adanya dukungan dari pihak Jabatan Komisaris Dinas Pariwisata Jepang. Yaitu Shigeto Kubo. Shigeto Kubo menyebutkan bahwa membangun pariwisata Jepang itu sangat penting. Karena dalam hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang dan mendukung vitalisasi regional. Perkembangan industri pariwisata merangsang konsumsi baru dan menciptakan kesempatan atau peluang kerja, menarik investasi, dan pada akhirnya mendorong ekonomi regional dan mendorong perekonomian Jepang secara keseluruhan¹¹.

Dukungan dari pihak dinas pariwisata Jepang tersebut untuk terus meningkatkan wisatawan yang ingin berkunjung ke Jepang, Khususnya bagi wisatawan atau pelancong dari negara Asia Tenggara. Dengan demikian Jepang mengambil langkah tindakan dalam memberikan bebas Visa terhadap Malaysia dan Thailand, Kebijakan bebas Visa terhadap negara Malaysia dan Thailand dalam rangka untuk meningkatkan hubungan kerjasama di bidang sektor wisata. Adanya bebas Visa bagi warga negara Malaysia dan Thailand akan memudahkan para wisatawan untuk mengunjungi Jepang tanpa harus mengaplikasi Visa ke

pihak kantor Kedutaan Besar Jepang. dan keputusan yang di tetapkan oleh pemerintah Jepang terhadap bebas Visa terhadap negara Malaysia dan Thailand yang merupakan suatu bentuk hubungan kerjasama antara Jepang dengan Thailand dan hubungan Jepang dengan Malaysia yang terjalin erat.

Gambar 1.2 : (Teori Sistem Politik)



Jadi menurut teori David Easton mengenai Sistem Politik dalam pembuatan keputusan yang merupakan dari hasil dari input - output, dimana sistem pemerintahan Jepang yang didukung oleh sistem pemerintahan mayoritas dari partai liberal demokrat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. kemudian adanya tuntutan dari pebisnis yaitu Industri Travel Jepang, Industri Travel Jepang menyebutkan bahwa Jepang merupakan negara yang berbasis pada orientasi wisata.¹² Yang sehingga tuntutan tersebut disetujui oleh perdana menteri

Jepang yaitu Shinzo Abe.¹³ dan mendapatkan dukungan (Support) dari pejabat pemerintah Jepang yaitu Dinas Pariwisata Jepang (Shigeto Kubo) untuk mencapai kepentingan nasional mereka serta mempertimbangkan segala keputusan-keputusan yang ada, keputusan tersebut seperti adanya kunjungan wisatawan dari kedua negara yaitu Malaysia dan Thailand yang cukup signifikan. Sehingga pemerintah Jepang melalui *Ministry of Foreign Affair* telah melakukan tindakan untuk memutuskan bebas Visa kepada wisatawan Malaysia dan wisatawan Thailand yang ingin berkunjung ke Jepang, kunjungan wisatawan yang diberikan hanya dalam jangka waktu yang sangat singkat dan pemberian bebas Visa tersebut sebagai promosi wisata Jepang kepada Malaysia dan Thailand.

Kemudian juga adanya hubungan kerjasama yang telah terjalin erat yaitu adanya hubungan kerjasama Jepang dengan Thailand di bidang industri, dimana investor Jepang diberikan ruang untuk menanamkan modalnya di Thailand, dan sedangkan investor Thailand juga diberikan ruang untuk menanamkan modalnya di Jepang. Sedangkan hubungan kerjasama Jepang dengan Malaysia terlihat dari hubungan kerjasama terhadap kebijakan melihat ke timur (*Look East Policy*).

E. Hipotesa

Kebijakan Jepang dalam memberlakukan bebas Visa kepada Malaysia dan Thailand karena adanya kepentingan politik Jepang terhadap Malaysia dan Thailand yaitu dengan mempromosikan wisata Jepang melalui bebas Visa (*Visa Exemption*), Serta kerjasama yang telah terbangun lewat industri otomotif di Thailand dan kebijakan melihat timur (*Look East Policy*) di Malaysia.

¹³ *Ibid* (Jata-net.or.jp)

F. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, agar tidak terlalu luas dalam pembahasan, maka penulis berusaha memberikan batasan dalam penulisan skripsi ini dalam waktu atau masa periode tertentu. Periode tersebut dalam proses kebijakan politik luar negerinya pada tahun 2013. Dipilih rentang waktu tahun 2013, karena berdasarkan isu kebijakan Jepang dalam memberikan bebas visa kepada Malaysia dan Thailand sesuai dengan judul penelitian ini yang telah ditetapkan pada awal bulan juli yang lalu tahun 2013. Pada awal bulan juli dan tahun 2013, pemerintah jepang telah memutuskan serta memberlakukan bebas visa kepada negara Malaysia dan Thailand untuk mengunjungi Jepang tanpa harus mengaplikasi visa. Hal ini merupakan kebijakan Jepang dalam rangka untuk meningkatkan wisatawan dari kedua negara tersebut untuk mengunjungi jepang dengan mudah dan tanpa harus mengurus visa. Jangkauan peristiwa di luar tahun tersebut penulis sedikit menyinggung, dan tidak menutup kemungkinan juga, penulis tidak sedikit pula akan menyinggungnya, selama masih ada ketertarikan dan keterkaitan serta relevansinya terhadap topik yang sedang di kaji atau di

G. Metode Penelitian

A. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini menggunakan studi pustaka. data-data di kumpulkan dari kebijakan keimigrasian, dan buku buku referensi pendukung dalam penelitian skripsi ini. serta literature lainnya seperti majalah, koran, jurnal online, artikel-artikel di internet yang masih relevan dan berkaitan dengan pokok permasalahannya.

B. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisa deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif yang menekankan pada akurasi kualitas data dengan menjelaskan dan menganalisis hubungan antara data, fakta, dan teori yang ada yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. setelah itu dilakukan dengan proses pemilahan, pengkategorian, dan pemusatan pada data yang memiliki akurasi informasi yang valid serta data yang masih memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. dalam hal penyajian, data ditampilkan dengan menggambarkan fenomena atau keadaan sesuai dengan data yang dapat diperoleh sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil pemikiran akan perbandingan mengenai kenyataan di lapangan dengan teori

' H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan dalam hal ini terbagi menjadi 5 bab, antara lain adalah :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Dalam Bab dua ini akan Membahas mengenai tentang Kebijakan Imigrasi Jepang

BAB III: Dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai tentang hubungan Jepang dengan Malaysia, dan Jepang dengan Thailand.

BAB IV: Pada bab ini, terdapat pembuktian sebuah hipotesa yang ada pada pokok permasalahan, dalam bab ini membahas cara pandang kebijakan Jepang dalam memberi bebas visa kepada negara Malaysia dan Thailand. Karena adanya kepentingan politik Jepang terhadap Malaysia dan Thailand yaitu dengan mempromosikan wisata Jepang melalui bebas Visa (*Visa Exemption*). Serta kerjasama yang telah terbangun lewat industri otomotif di Thailand dan kebijakan melihat timur (*Look East Policy*) di Malaysia